

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi orang tua, aset kehidupan serta sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu wajib bagi orang tua, masyarakat, serta negara melindungi haknya. Hak asasi anak dilindungi dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Anak dalam *siklus* kehidupan adalah sosok individu yang akan meneruskan *estafet* kehidupan orang dewasa dan melanjutkan eksistensi peradaban suatu bangsa. Bagaimana wajah dinamika kehidupan 20-30 tahun yang akan datang maka anak adalah jawabannya. Sebagai bahan evaluasi sederhana, kita bisa melihat bagaimana kualitas anak sekarang untuk mengetahui maju mundurnya kehidupan di suatu bangsa di masa depan. Jika sekarang anak-anak di negeri ini berkualitas, mungkin kita bisa sedikit bernafas lega, karena berarti kita mempunyai bibit-bibit pemimpin yang berkualitas. Walaupun hal itu baru berupa bayangan, kerangka atau bahkan baru sebatas mimpi, namun paling tidak ada peluang besar untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Apabila saat ini anak-anak di negeri ini bermental bobrok atau tidak berkualitas, berarti kita telah

berhadapan dengan mimpi buruk, yang untuk keluar dari mimpi buruk itu tentunya membutuhkan tenaga yang ekstra besar.¹

Prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan anak dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak”.

Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan proses peradilan orang dewasa yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbedaan dimaksud antara lain diatur pada Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi:

“Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan c) pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan”.

Tahap penuntutan adalah salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada Pasal 30 mengatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan, serta berdasarkan Kitab

¹Bambang Sukoco, 2016, *Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah)*, Surakarta: Jurnal Law and Justice, Vol.1 No. 1, Oktober 2016, hlm. 54.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, dalam prosesnya, penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda dengan proses penuntutan pada umumnya, karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, bahwa aturan hukum yang khusus (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (KUHP).

Akhir-akhir ini jumlah persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal yang paling menakutkan adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga berjumlah 1.413 kasus pada 2012. Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku. Jumlahnya pun tidak kalah tinggi. Tercatat, pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak sebagai korban, terdapat 134 kasus. Menurut Komisioner Bidang Trafficking KPAI, Ai Maryati Solihah, kasus ABH ini ternyata menimbulkan stigma di masyarakat. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi penyumbang kekerasan psikis terhadap anak. “Imbas paling parah dari stigmatisasi membuat anak melakukan bunuh diri,” kata Ai Maryati Solihah dalam “Seminar Perlindungan Anak” bersama Komisi VII DPR RI di Bogor.²

Contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, seorang siswi umur sekitar 13 tahun kelas 6 SD,

² Davit Setyawan, 10 Oktober 2017, KPAI: *Enam Tahun Terakhir , Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> diunduh pada 12 Maret 2019, pukul 19.07.

hamil tiga bulan setelah disetubuhi 4 bocah yang masih di bawah umur. Masing-masing pelaku diketahui masih berusia 13-15 tahun. Karena korban dan pelaku sama-sama di bawah umur maka akan berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, dalam membuat surat dakwaan diharapkan mampu membuat surat dakwaan dan tuntutan pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku berupa sanksi pidana atau tindakan, tanpa mengurangi hak-hak dari pelaku yang masih di bawah umur. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menganalisis sejauh mana peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar)”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Membatasi ruang lingkup maupun objek sangat penting dalam melakukan suatu penelitian agar kajian dapat dilakukan secara terarah, fokus pada sasaran yang direncanakan, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Untuk itu penulis membuat pembatasan masalah mengenai apa

³ Yoanes Lita, 3 April 2018, *Siswi Kelas 6 SD di Poso Hamil Tiga Bulan Usai Disetubuhi 4 Bocah*, dalam <https://news.okezone.com/read/2018/04/03/340/1881532/siswi-kelas-6-sd-di-poso-hamil-tiga-bulan-usai-disetubuhi-4-bocah> diunduh pada 18 Februari 2019, pukul 09:45.

yang akan diteliti yaitu Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana profil peraturan terkait peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar ?
- b. Bagaimana peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar ?
- c. Bagaimana penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif hukum islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui profil peraturan terkait peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

- c. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, ilmu dan pemahaman di bidang hukum pidana bagi masyarakat mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar.
- 2) Dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar dan proses peradilan pidana anak dalam perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk membentuk pola pikir yang dinamis dan mengembangkan penalaran bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan dalam pembuatan penelitian hukum.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan baru bagi masyarakat terhadap peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri

Karanganyar dan proses peradilan pidana anak dalam perspektif hukum islam.

D. Kerangka Pemikiran

Negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak kita perjuangkan atau tegakkan di negeri ini ialah suatu negara hukum dalam artiannya yang materiil, *the Rule of Law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip untuk yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fulfil*).⁴

Salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*).⁵

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial yang menuju kesempurnaan yang dimiliki orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa.⁶

Jadi, walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan

⁴ Hariyono, dkk., 2013, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, hlm.5.

⁵ Ibid, hlm. 6.

⁶ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 75.

melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.⁷

Maka dari itu Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan pada proses peradilan pidana, diharapkan dalam membuat surat dakwaan melalui Jaksa Penuntut Umum, mampu memberikan efek jera bagi anak yang melakukan tindak pidana, melalui hukuman yang telah didakwakan dengan tetap mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Al-Quran Al-Karim perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab diberi hukuman dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah. Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah Al-Quran dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ajaran Islam memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan di dunia menghapuskan dosa dan siksaanya di akhirat. Sabda Rasul SAW; *Artinya: 'Hukuman dunia (had) menghapuskan dosa di akhirat.'*⁸

Mendidik anak dengan akhlak yang terpuji adalah kewajiban setiap orang tua. Rasulullah SAW menyebutkan hal itu merupakan pemberian orang tua kepada anaknya yang sangat mahal harganya. Seperti sabda Rasulullah SAW: *"Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih mahal*

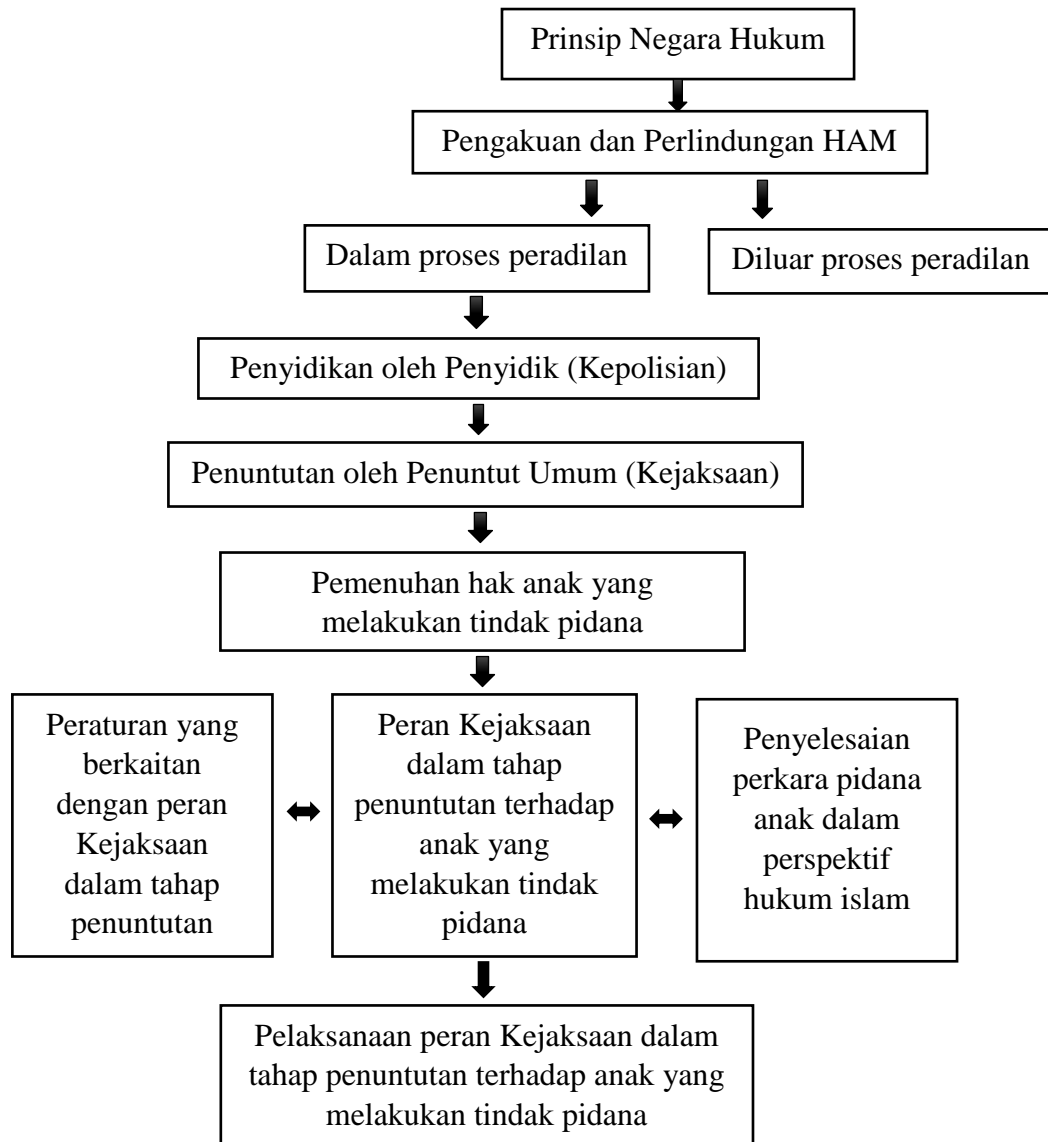
⁷ *Ibid*, hlm. 76.

⁸ Ismail Muhammad Syah, dkk, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 221.

nilainya dari pada mendidik akhlak karimah”.(H.R. Bukhari). Salah satu ciri khas hukum Islam adalah insaniyah, yang berarti bahwa Islam memberikan kemulyaan kepada manusia. Di dinilah hukum Islam dilengkapi dengan aturan yang tetap relevan meski terjadi perubahan zaman dan tetap bersifat universal, tentunya hal ini menuntut kemampuan rasional dalam menginterpretasikan nilai-nilai tersebut. Agama Islam sangat mengancam tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Untuk itu, ada beberapa peerapan yang dianggap mumpuni diantaranya: Pertama, harus adanya pendidikan moral dan intelektual, dilakukan secara seimbang. Yang kedua, bahwa pendidikan anak haruslah bersifat bebas, dengan maksud bahwa orang tua dituntut untuk secara tidak langsung untuk membimbing dan memperhatikan anak, sehingga kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir.⁹

Kerangka pemikiran diatas dapat disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini:

⁹ Muhammad Barid Nizarudin Wajdi, 2017, *Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum LPKS ABH) Di Nganjuk*, Nganjuk: Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Vol. 3 No. 1, Maret 2017, hlm 181.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris yaitu dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai peraturan yang mengatur peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan dan melihat keadaan riil yang terjadi terkait peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan proses peradilan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan profil peraturan Kejaksaan serta menganalisis terkait peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan dalam perspektif Hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi yang bertempat di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berupa keterangan dan fakta yang didapat secara langsung di Kejaksaan Negeri Karanganyar terkait peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadist
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- f) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni meliputi jurnal hukum, karya ilmiah, literature, media massa, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yakni kamus dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam tahap ini peneliti melakukan inventarisasi terhadap data sekunder. Inventarisasi bahan hukum (data sekunder) merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk menuju tahap atau

langkah kajian berikutnya¹¹, yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan dalam perspektif Hukum Islam.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan Pejabat Kejaksaan mengenai profil peraturan Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, serta mengenai pelaksanaan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

2) Pengamatan

Melihat, menyimak, dan mencatat pelaksanaan tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

6. Metode Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur dan teori tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kesimpulan dan mendeskripsikannya dalam bentuk laporan penelitian yang lengkap dan mendalam. Pengambilan kesimpulan

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 82.

dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional lalu dianalisis dan melihat penerapan dalam praktik di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari 4 (empat) bab :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum dari penelitian ini berupa : latar belakang masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kejaksaan, Tugas dan Kewenangan, Penuntutan Sebagai Tahan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Anak dan Hak-haknya, Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana, Sanksi Pidana Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan isi pokok-pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: 1) profil peraturan tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana; 2) peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana; 3) proses peradilan pidana anak dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.